

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

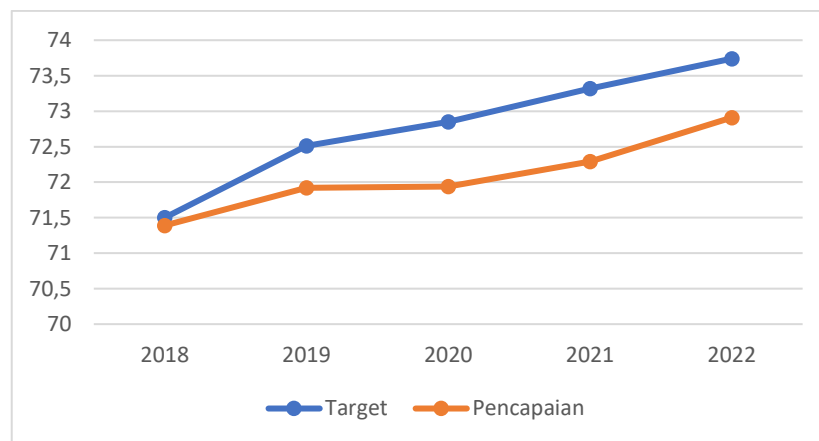
Fenomena ketimpangan dalam pembangunan manusia di Indonesia masih menjadi isu yang cukup mencolok, meskipun ada peningkatan di berbagai daerah. Salah satu indikatornya ialah perbedaan dalam pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Suryaningrum et al., 2023). Pembangunan manusia ialah suatu proses yang bermaksud guna menjamin bahwa setiap masyarakat mempunyai berbagai pilihan, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan dan standar hidup yang layak (Badan Pusat Statistik, 2022). Keberhasilan pembangunan manusia dapat diukur ketika masyarakat dapat merasakan hasil dari pembangunan, seperti akses terhadap fasilitas pengajaran yang memadai, pelayanan medis yang berkualitas, serta kesempatan untuk memperoleh pendapatan yang cukup guna menjalani kehidupan yang layak. Selain itu, pembangunan manusia yang berhasil juga berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu negara (Nasyri et al., 2024).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ialah salah satu cara untuk menilai seberapa baik pembangunan manusia di sebuah negara, baik dalam hal kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat menunjukkan kondisi masyarakat untuk mencapai hasil pembangunan yang baik melalui akses terhadap layanan pendidikan yang memadai, layanan kesehatan yang berkualitas, dan standar hidup yang layak di suatu daerah (Nasution, 2021). Pada tahun 1990, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pertama kali ditetapkan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) dan diterbitkan setiap tahun (Christyadi et al., 2020).

Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), Indonesia menempati peringkat 112 dari 193 negara-negara di dunia dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kategori tinggi yakni senilai 0,713 (Nashshar & Mulyana, 2022). Sedangkan, informasi dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2022

menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berada di angka 72,91 (Badan Pusat Statistik, 2022). Angka tersebut menunjukkan bahwa pembangunan manusia Indonesia termasuk kategori tinggi. Hal ini berarti bahwa berbagai inisiatif pemerintah terhadap pembangunan manusia telah berhasil.

Gambar 1.1. Target dan Pencapaian IPM Indonesia 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 (Data Diolah)

Gambar 1.1 di atas menunjukkan bahwa target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2018 ialah 71,5, sementara pencapaiannya 71,39. Pada tahun 2019, target yang ditetapkan 72,51, sedangkan pencapaian mencapai 71,92. Target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2020 ialah 72,85 dengan pencapaian 71,94. Target untuk tahun 2021 ialah 73,32, dan pencapaiannya ialah 72,29. Pada tahun 2022, target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ialah 73,74, sementara pencapaian mencapai 72,91. Dari analisis data perbandingan target dan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2018-2022, terlihat bahwa meskipun ada peningkatan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) setiap tahunnya, pencapaian tersebut masih belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan. Upaya yang berkelanjutan dan kebijakan yang tepat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat dicapai di masa mendatang (Nashshar & Mulyana, 2022).

Kendala yang dihadapi pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan manusia ialah belum meratanya pembangunan antar wilayah di Indonesia. Hal ini mendedikasikan bahwa meskipun pembangunan telah berjalan dengan baik, masih

ada masyarakat yang belum dapat menikmati hasil dari pembangunan (Louhenapessy, 2023).

Tabel 1.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Barat 2018-2022

Wilayah	Index Pembangunan Manusia				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jawa Barat	71,30	72,03	72,09	72,45	73,12
Kab. Bekasi	73,49	73,99	74,07	74,45	75,22
Kab. Bogor	69,69	70,65	70,40	70,60	71,20
Kab. Sukabumi	66,05	66,87	66,88	67,07	67,64
Kab. Cianjur	64,62	65,38	65,36	65,56	65,94
Kab. Subang	68,31	68,69	68,95	69,13	69,87
Kab. Purwakarta	69,98	70,67	70,82	70,98	71,56
Kab. Karawang	69,89	70,86	70,66	70,94	71,74
Kab. Bandung	71,75	72,41	72,39	72,73	73,16
Kab. Bandung Barat	67,46	68,27	68,08	68,29	69,04
Kab. Sumedang	70,99	71,46	71,64	71,80	72,69
Kab. Garut	65,42	66,22	66,12	66,45	67,41
Kab. Tasikmalaya	65,00	65,64	65,67	65,90	66,84
Kab. Ciamis	69,63	70,39	70,49	70,93	71,45
Kab. Pangandaran	67,44	68,21	68,06	68,29	69,04
Kab. Cirebon	68,05	68,69	68,75	69,12	70,06
Kab. Indramayu	66,36	66,97	67,29	67,64	68,55
Kab. Kuningan	68,55	69,12	69,38	69,71	70,16
Kab. Majalengka	66,72	67,52	67,59	67,81	68,56
Kota Depok	80,29	80,82	80,97	81,37	81,86
Kota Bekasi	81,04	81,59	81,50	81,95	82,46
Kota Bogor	75,66	76,23	76,11	76,59	77,17
Kota Sukabumi	73,55	74,31	74,21	74,60	75,40
Kota Bandung	81,06	81,62	81,51	81,96	82,50
Kota Cimahi	77,56	78,11	77,83	78,06	78,77
Kota Cirebon	74,35	74,92	74,89	75,25	75,89

Kota Tasikmalaya	72,03	72,84	73,04	73,31	73,83
Kota Banjar	71,25	71,75	71,70	71,92	72,55

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 (Data Diolah)

Tabel 1.1 menunjukkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di seluruh wilayah Jawa Barat dari tahun 2018 hingga 2022. Secara umum, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat meningkat dari 71,30 pada tahun 2018 menjadi 73,12 pada tahun 2022, mencerminkan perkembangan positif dalam kualitas hidup masyarakat. Kota-kota besar seperti Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Bandung, memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang lebih tinggi dibandingkan wilayah kabupaten, menunjukkan akses yang lebih optimal untuk fasilitas yang mendukung kualitas hidup. Sementara itu, wilayah kabupaten seperti Cianjur dan Sukabumi juga menunjukkan peningkatan, meskipun laju kenaikannya lebih lambat. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di seluruh wilayah ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan aspek kesehatan, pendidikan, dan perekonomian masyarakat (Firmansyah et al., 2024).

Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak hanya bergantung pada pembangunan ekonomi tetapi juga kemajuan di semua dimensi (Mahaditya, 2018). Pembangunan ekonomi harus didukung oleh inisiatif untuk mendorong pemerataan pembangunan di seluruh lapisan masyarakat. Pemerataan pembangunan menjamin seluruh penduduk dapat memperoleh manfaat dari hasil pembangunan (Patadang & Rotinsulu, 2021). Pembangunan manusia dapat dicapai melalui beberapa cara, termasuk pemerataan pendapatan dan alokasi belanja pemerintah yang tepat (Junaedi, 2020).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengkategorikan Pendapatan Daerah menjadi tiga kelompok utama: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Pendapatan Lain-lain yang Sah (Sam & Erwati, 2020). Dari ketiga kategori tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah faktor terpenting yang mendukung kemampuan daerah untuk mencapai keseimbangan fiskal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bebas diterapkan oleh pemerintah untuk mendanai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah

(Handayani & Nursiam, 2020). Pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lainnya yang sah ialah sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Hafandi & Romandhon, 2020). Berikut ialah *Trend* Komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2018-2022.

Gambar 1.2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat 2018-2022



Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Data diolah)

Dari gambar 1.2 di atas, dari tahun 2018 hingga 2022, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat menunjukkan fluktuasi yang signifikan pada setiap akun pendapatan. Pajak Daerah meningkat dari 18.153,62M pada 2018 menjadi 19.626,35M pada 2019, tetapi turun menjadi 17.035,96M pada 2020 akibat pandemi COVID-19, sebelum naik kembali ke 21.542,60M pada 2022. Retribusi Daerah mengalami pola serupa, naik dari 49,18M pada 2018 ke 56,22M pada 2019, kemudian turun ke 40,22M pada 2020, dan naik sedikit ke 44,84M pada 2022. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah konsisten meningkat dari 348,54M pada 2018 menjadi 468,99M pada 2022, menunjukkan efisiensi pengelolaan aset yang lebih baik. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah juga naik dari 1.091,58M pada 2018 ke 1.175,25M pada 2019, lalu turun ke 1.044,0M pada 2020 dan 1.028,45M pada 2021, sebelum kembali meningkat ke 1.193,19M pada 2022 (jabar.bps.go.id, 2024). Secara keseluruhan, meskipun pandemi mengakibatkan

penurunan pendapatan pada 2020 dan 2021, data menunjukkan pemulihan yang kuat pada 2022, didorong oleh peningkatan dalam setiap akun Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Wibowo (2021), potensi sumber daya yang dimiliki setiap daerah berbeda satu sama lain. Hal ini disebabkan beberapa daerah tidak mempunyai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memadai guna membiayai seluruh kebutuhan fiskalnya. Akibatnya, pemerintah pusat mentransfer sejumlah dana ke daerah yang biasanya disebut sebagai dana perimbangan (Sembiring, 2020).

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan komponen dana perimbangan yang dialokasikan kepada daerah oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) demi memenuhi keperluan daerah tertentu yang sesuai dengan prioritas nasional (Buana, 2022). Ada tiga kategori Dana Alokasi Khusus (DAK), yakni Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan (Simanjuntak & Muchtar, 2024). Penelitian ini akan difokuskan pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebab berbagai sektor penting daerah yang di danai melalui program tersebut dinilai sangat penting (Maysaroh & Arif, 2022).

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik mendukung pembangunan, pembelian, pemeliharaan, dan peningkatan layanan penting melalui pembiayaan jangka panjang (Diaman & Handayani, 2023). Otoritas pusat menyuplai anggaran untuk otoritas lokal melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk menyediakan sarana dan infrastruktur fisik yang menjadi prioritas pemerintah untuk mengurangi ketimpangan pertumbuhan ekonomi diantara daerah (Talangamin et al., 2020). Menurut penelitian (Maysaroh & Arif, 2022), jika diterapkan untuk kegiatan pembangunan, Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Penelitian (Simanjuntak & Muchtar, 2024) menunjukkan, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik berdampak positif dan signifikan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang menunjukkan bahwa realisasinya harus ditingkatkan untuk meningkatkan tingkat pembangunan manusia di Indonesia.

Provinsi Jawa Barat mempunyai 27 kabupaten dan kota yang meliputi 9 wilayah metropolitan dan 18 kabupaten. Provinsi Jawa Barat mendapat alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahunan dari pemerintah pusat, yang sebagian diperuntukkan bagi desa sebagai Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2022) menunjukkan bahwa praktik pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) masih kurang optimal mengenai besaran alokasinya (Maysaroh & Arif, 2022). Berikut anggaran dan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Provinsi Jawa Barat tahun 2018 hingga 2022.

Tabel 1.2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Provinsi Jawa Barat 2018-2022

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2018	545,90 M	506,12 M	92,71
2019	693,88 M	602,43 M	86,82
2020	869,33 M	814,90 M	93,74
2021	736,31 M	481,66 M	65,42
2022	640,69 M	573,15 M	89,46

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Data Diolah)

Tabel 1.2 menunjukkan anggaran dan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Provinsi Jawa Barat dari tahun 2018 hingga 2022. Pada tahun 2018, dari anggaran 545,90 Miliar Rupiah, 92,71% berhasil direalisasikan, sementara tahun 2019 memiliki realisasi senilai 86,82% dari anggaran 693,88 Miliar Rupiah. Tahun 2020 mencatat tingkat realisasi tertinggi dengan 93,74% dari anggaran 869,33 Miliar Rupiah. Namun, pada tahun 2021, realisasi turun drastis menjadi 65,42% dari anggaran 736,31 Miliar Rupiah. Tahun 2022 menunjukkan peningkatan realisasi senilai 89,46% dari anggaran 640,69 Miliar Rupiah (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022). Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terjadi fluktuasi dalam efektivitas penggunaan anggaran dari tahun ke tahun, hal ini tentu menunjukkan perlunya evaluasi dan strategi pengelolaan anggaran yang lebih baik untuk meningkatkan realisasi dana di masa mendatang.

Atas dasar permasalahan tersebut, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK). Upaya perbaikan pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) telah dilaksanakan pemerintah diantaranya ialah mengubah kebijakan penyusunan Dana Alokasi Khusus (DAK)

menjadi berbasis *output*, perubahan mekanisme alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dikelola secara *bottom-up* melalui mekanisme *proposal based* (usulan daerah), serta menata kembali bidang-bidang Dana Alokasi Khusus (DAK) agar lebih fokus pada peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik, sehingga memberi keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berbentuk fisik sampai dengan 5% dari anggaran untuk membiayai kegiatan non fisik, serta sinkronisasi antar tingkat pemerintahan dan perencanaan pembangunan antardaerah (Nashshar, 2022).

Alokasi dana yang ditransfer ke daerah akan bermanfaat bagi masyarakat apabila dana tersebut direalisasikan dalam bentuk belanja daerah (Kurniati & Devi, 2022). Belanja modal mengacu pada belanja daerah yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan masyarakat. Belanja modal sangat penting untuk melaksanakan operasi dan tugas pemerintah, serta memberikan layanan publik (Angelina & Efni, 2023). Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer sebagian besar dialokasikan untuk belanja pegawai dan kegiatan operasional. Situasi ini membuat daerah sangat bergantung pada sumber pendapatan tidak langsung, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), untuk mendanai belanja modal (Kurniati & Devi, 2022).

Dalam era otonomi, pemerintah daerah harus melakukan pendekatan terhadap berbagai pelayanan dasar masyarakat guna meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Oleh karena itu, alokasi belanja modal menjadi peran penting dalam peningkatan pelayanan masyarakat, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembangunan manusia (Simarmata et al., 2024).

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM), rasio obyektif belanja modal pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah 30%. Pada tahun 2022, rata-rata belanja modal pemerintah daerah sebesar 11,14%. Angka tersebut masih terbilang rendah dan di bawah target pemerintah. Untuk mencapai target 30%, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas belanja pemerintah. Salah satunya ialah meningkatkan

kualitas belanja pemerintah dengan mengubah anggaran belanja konsumsi menjadi anggaran belanja produktif (Mahpudin, & Lestari, 2021).

Penyedia infrastruktur tidak dapat beroperasi tanpa mengeluarkan biaya untuk meningkatkan belanja modal. Biaya adalah mekanisme yang digunakan oleh entitas, termasuk masyarakat dan perusahaan, untuk memperoleh pendapatan dari aktivitas mereka. Dengan demikian, pemerintah harus membantu penyaluran pengeluaran, termasuk penyediaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk meningkatkan belanja modal yang diperkirakan akan berdampak positif pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Megawati & Arifin, 2022).

Rasio belanja modal yang masih di bawah target, belum meratanya pembangunan di Indonesia, serta realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana yang dialokasikan khusus untuk fasilitas fisik yang belum optimal menunjukkan bahwa implementasi desentralisasi di Indonesia belum sepenuhnya dapat memberi dampak terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Ishak et al., 2020). Hasil penelitian Hasan & Agung (2018) menunjukkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) memberi dampak terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui belanja modal. Penelitian Megawati & Arifin (2022) mendukung temuan ini dengan menekankan betapa pentingnya belanja modal untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sebaliknya, menurut Riviando, Agustin & Halmawati (2019), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) memberi dampak terhadap pembangunan manusia ketika dialokasikan untuk belanja modal.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti menambahkan untuk periode tahun yaitu periode 2018 sampai 2022. Tahun yang digunakan dalam penelitian ini dikarenakan untuk melihat pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada masa sebelum, saat, dan sesudah pandemi COVID-19 tetap konsisten atau berubah sehingga memberikan peluang untuk meneliti lebih dalam. Sehingga peneliti mengambil judul **"Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan**

Belanja Modal sebagai Variabel *Intervening* (Studi pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022)”.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian konteks latar belakang yang telah disampaikan, maka masalah yang diidentifikasi didalam penelitian ini, yakni:

1. Data menunjukkan adanya ketimpangan yang mencolok dalam capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antar wilayah di Provinsi Jawa Barat. Beberapa kota besar seperti Kota Bekasi dan Kota Bandung memiliki angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah kabupaten seperti Cianjur dan Sukabumi. Perihal ini menunjukkan bahwa akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masih belum merata di seluruh wilayah Jawa Barat.
2. Kebijakan desentralisasi fiskal yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dasar masyarakat dan pembangunan manusia, masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Perlu adanya evaluasi terhadap efektivitas desentralisasi fiskal dalam mendukung pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat.
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Barat mengalami fluktuasi yang signifikan selama periode 2018-2022. Terutama pada tahun 2020, terjadi penurunan yang signifikan akibat pandemi COVID-19. Perihal ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam pendanaan pembangunan manusia jika tidak dikelola dengan baik.
4. Sebagian besar daerah di Jawa Barat menghadapi tantangan serius terkait ketidakcukupan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai kebutuhan fiskal mereka. Hal ini menyebabkan ketergantungan yang tinggi pada dana perimbangan dari pemerintah pusat, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, untuk mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah.
5. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dirancang untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan urusan daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana fisik sesuai dengan prioritas nasional.

Namun, tantangan muncul dalam hal efektivitas alokasi dana tersebut. Tanpa adanya mekanisme pengawasan yang ketat dan transparansi dalam penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, ada risiko bahwa dana ini tidak diterapkan dengan sebaik-baiknya.

C. Batasan Masalah

Dari analisis masalah yang telah disajikan, untuk memperjelas masalah penelitian agar terfokus. Oleh sebab itu, peneliti membatasi pada isu-isu seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan belanja modal di Provinsi Jawa Barat selama tahun 2018-2022.

D. Rumusan Masalah

Dari pembatasan masalah yang ada, pembahasan akan dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022?
2. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022?
3. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022?
4. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022?
5. Bagaimana pengaruh Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022?
6. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui pemediasi Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022?
7. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui pemediasi Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022?

E. Tujuan Penelitian

Dalam upaya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan, berikut ialah tujuan yang ingin dicapai didalam penelitian berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022.
6. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui pemediasi Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022.
7. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui pemediasi Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian berikut diharapkan memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi berbagai pihak yang terkait. Manfaat-manfaat tersebut diantara lain:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap agar dapat memperkaya literatur mengenai hubungan diantara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan belanja modal.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan bisa memberi informasi penilaian pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) agar dapat mengalokasikan sumber daya keuangan dengan lebih tepat sasaran.

b. Bagi Peneliti

Pengetahuan dan wawasan yang diperoleh akan membantu mencapai hasil yang diinginkan dengan mengatasi sejumlah masalah yang berdampak pada faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

c. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian berikut memberi pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana kebijakan fiskal daerah dapat berdampak pada peningkatan kualitas hidup mereka. Dengan informasi ini, masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menguraikan tentang landasan teori yang dipergunakan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

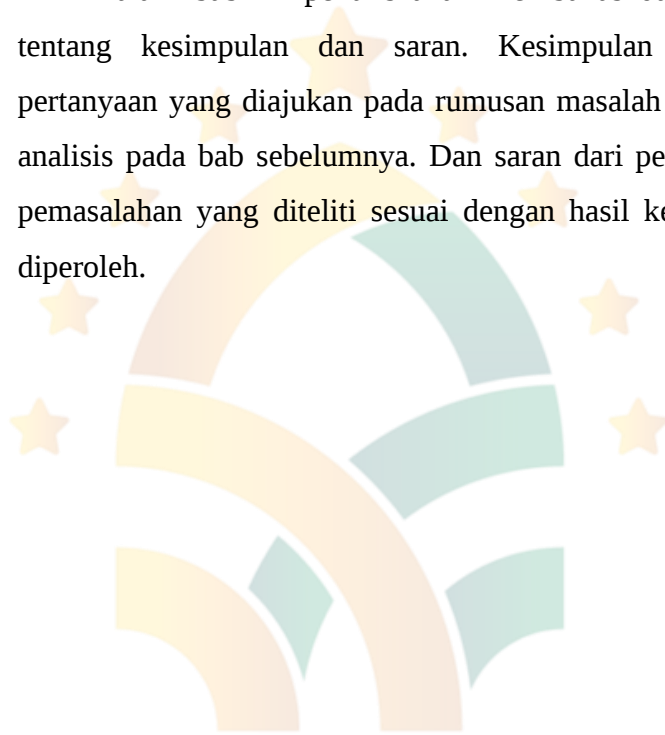
Pada bab ini penulis akan membahas dan menguraikan variabel-variabel penelitian dan definisi operasionalnya, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengambilan sampel, dan teknik analisis data dengan menggunakan berbagai pengujian antara lain uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menguraikan tentang hasil pengujian deskripsi, hasil pengujian asumsi klasik, hasil pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menguraikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan atas jawaban pertanyaan yang diajukan pada rumusan masalah setelah melalui analisis pada bab sebelumnya. Dan saran dari peneliti mengenai permasalahan yang diteliti sesuai dengan hasil kesimpulan yang diperoleh.



UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON